BAB 4

ALASAN CINA MEMPRIORITASKAN HARD POWER DALAM PENYELESAIAN KONFLIKNYA DENGAN TAIWAN

Setelah menyimak pembahasan mengenai Garis Besar Politik Luar Negeri Cina serta Sejarah dan Dinamika Hubungan Cina dan Taiwan di bab – bab sebelumnya, Kali ini penulis akan membahas analisis mengenai alasan atau sebab Cina memprioritaskan kebijakan Hard Powernya terhadap Taiwan. Di bagian ini juga akan di jelaskan mengenai teori yang di gunakan penulis untuk menganalisis masalah ini.

A. Konsep Hard Power bagi Cina

Sebagaimana di jelaskan di bab – bab sebelumnya bahwa, kemunculan Taiwan sebagai suatu negara pasca berakhirnya perang saudara di akhir 1940-an, telah menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan Cina. Keinginan Taiwan yang ingin melepaskan diri dari wilayah kekuasaan Cina telah menjadi bagi alasan Cina untuk menggunakan kekuatan Hard Power-nya terhadap Taiwan. Selain itu, Cina juga melakukan berbagai upaya untuk mengisolasi Taiwan dari "pergaulan" internasional. Upaya Cina ini, tentu saja mendapatkan reaksi keras dari Taiwan, yang selalu berupaya melepaskan diri dari Cina Namun, sebelum penulis menjelaskan secara detail mengenai alasan Cina tersebut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai konsep Hard Power itu sendiri. Sebagaimana yang juga telah dijelaskan

sebelumnya, bahwa Hard Power adalah satu cara diplomasi yang cenderung menggunakan senjata untuk membuat aktor lain menuruti apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, Hard Power adalah suatu cara diplomasi yang mengutamakan paksaan dan kekerasan kepada pihak/aktor lain, agar pihak yang lain tersebut menuruti keinginan negara yang bersangkutan. Hard Power bersumber dari beberapa hal, seperti : kekuatan bersenjata, kapasitas militer, dan pengaruh yang kuat. Lebih jauh lagi, diplomasi secara hard power dapat dilakukan dengan pelatihan militer di wilayah - wilayah negara lain atau bahkan dengan cara melakukan intervensi dan agresi secara militer ke negara lain untuk memaksakan kehendak negara lain tersebut untuk menuruti keinginannya, sedangkan dalam tataran konflik, terutama sengketa wilayah, diplomasi secara Hard Power dapat dilakukan dengan cara melakukan penempatan instrumen – instrumen militer seperti melakukan pembangunan pangkalan militer di daerah konflik dan melakukan pelatihan militer di daerah konflik.

Dalam dua konsep tersebut, istilah 'power' mempunyai definisi sendiri. Dalam definisinya, power memiliki tiga unsur. Unsur pertama yakni *kekuatan* (force) yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit dimana sebuah aktor (misal aktor A) menggunakan alat – alat paksa seperti militer, ekonomi, dan lain – lain terhadap aktor lainnya (misal aktor B) untuk mencapai tujuan – tujuan politik aktor A tadi. Unsur kedua yakni *pengaruh* (influence), yang didefinisikan sebagai penggunaan alat – alat persuasi – jenis kekuatan – oleh aktor A untuk menjaga atau mengubah perilaku aktor

B dengan cara – cara yang sesuai dengan preferensi atau keinginan aktor A. Dan unsur power yang ketiga yakni *kekuasaan* (authority), yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi instruksi – instruksi (preskripsi, perintah) yang dikeluarkan oleh aktor A, yang dipelihara dalam persepsi B mengenai aktor A – seperti sikap hormat, solidaritas, kasih saying, afiliasi atau pertalian keturunan, kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian[94]. Secara skematis, konsep power dapat digambarkan sebagai berikut:[95]

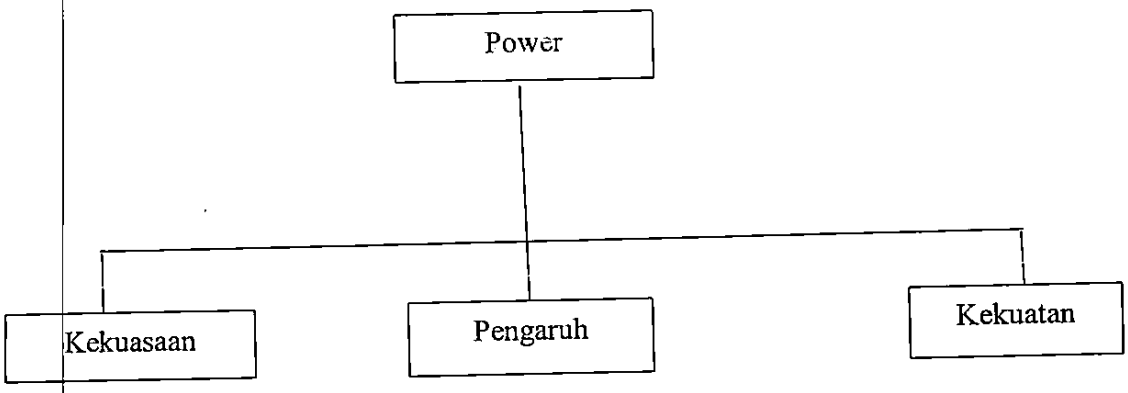

Dan jika kita melihat dan menghubungkan antara konsep Hard Power dan juga skema diatas dengan tindakan agresif Cina terhadap Taiwan, maka kita akan menemukan suatu kecocokan. Berdasarkan konsep dan skema tersebut, Cina (aktor A) terus melakukan peningkatan kekuatan militernya sebagai ancaman terhadap Taiwan (aktor B) untuk mencapai tujuan politiknya, yakni meredam upaya separatisme Taiwan.

[94] Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfe dalam *"Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power"*, hal 88, Putra A Bardin, cv, 1999
[95] Ibid

Selain menggunakan kekuatan sebagai salah satu unsur power, Cina juga menggunakan pengaruh (influence) untuk mengubah perilaku Taiwan tersebut sesuai dengan cara dan keinginannya dan demi mewujudkan tujuan politiknya yang sesuai dengan keinginannya tersebut, Cina juga menggunakan kekuasaannya (authority) agar Taiwan mampu bersikap rela untuk memenuhi instruksi – instruksi yang dikeluarkan oleh Cina. Untuk menggunakan ketiga unsur power inilah, maka pemerintah Cina terus menerus melakukan penguatan internal militer mereka. Hal ini dibuktikan dengan inisiatif Pemerintah China menaikkan kembali anggaran militernya. Dalam paparan Departemen Pertahanan China tahun 2012 terlihat adanya peningkatan anggaran mencapai 670,27 miliar yuan (sekitar Rp. 965 triliun) yang berarti meningkat sebesar 11,2% atau 67 miliar yuan (sekitar Rp. 96,5 triliun) dari anggaran tahun lalu. Anggaran Departemen Pertahanan China merupakan yang terbesar kedua di dunia dengan jumlah hanya terpaut 4,8% dari anggaran militer AS. Peningkatan anggaran militer tersebut membuktikan China memiliki kekuatan posisi tawar-menawar (bargaining power) yang tinggi di dunia internasional dan mampu mengimbangi pengaruh AS tidak hanya dalam bidang ekonomi di wilayah Asia Pasifik, Peningkatan anggaran militer China terjadi setiap tahun secara signifikan. Hal ini tentunya memunculkan kekhawatiran bagi banyak pihak, di antaranya meyakini China akan semakin memperkuat klaim kekuasaannya di wilayah Laut

Namun tidak sedikit yang meyakini bahwa peningkatan jumlah anggaran ini merupakan reaksi untuk mengimbangi dominasi AS di Asia Pasifik, setelah negara adi kuasa tersebut melakukan penempatan pasukan di Australia. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah China menyatakan negaranya tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain. Kebijakan pertahanan nasional dengan pertahanan sebagai cirinya bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan keutuhan wilayahnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan kebangkitan China untuk perdamaian (peaceful Rise Existance) yang merupakan kebijakan pemerintahan Hu Jintao. Menurut Pemerintah China, dengan populasi penduduk 1,3 miliar jiwa, kawasan yang luas dan garis pantai yang panjang, anggaran pertahanan tersebut masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara besar lain.[96]

Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita China, jumlah presentase alokasi anggaran militer ini jumlahnya masih kecil yakni hanya sebesar 1,28%. Jumlah ini masih kalah dari prosentase negara lain yang mencapai lebih dari 2% terhadap pendapatan perkapitanya. Pemerintah China tidak memungkiri, dalam upaya menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan keutuhan wilayahnya, China berusaha untuk memenangkan "perang lokal" terkait sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga. Sejak beberapa tahun terakhir, ketegangan sengketa teritorial China dengan negara-negara tetangga, seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Vietnam, terus

[96] Sebagaimana di jelaskan oleh Lisbet dalam *"Peningkatan Kekuatan Militer Cina"* dalam *Info Singkat Hubungan Internasional*, edisi Maret 2012 hal 5

meningkat. Selain itu, China juga mengklaim kepemilikan atas seluruh Laut China Selatan, yang di dalamnya terdapat kepulauan Spartly. Padahal, kepulauan tersebut juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia. China juga telah lama bersitegang dengan Jepang dalam memperebutkan pulau Senkaku atau dikenal pula dengan sebutan pulau Diaoyu. Adanya tarik-menarik dua kekuatan besar AS dan China tersebut pada akhirnya akan memengaruhi konstelasi keamanan di kawasan Asia Pasifik[97]. Potensi konflik antara China dengan negara tetangganya, yang notebene merupakan sekutu AS, diyakini mendorong negara adi daya tersebut mulai mengerahkan pasukannya di Australia guna mengamankan wilayah Asia Pasifik.

Kekuatan ini pun semakin diperlengkapi dengan adanya dukungan personil militer terbesar di dunia. China memiliki tentara aktif yang berjumlah sebanyak 2.255.000 orang. Sedangkan tentara cadangannya mencapai 800.000 orang dan paramiliter aktif sebanyak 3.969.000 orang. Beragam dan banyaknya jumlah dari peralatan tersebut pun semakin membuktikan bahwa China tengah mempersiapkan diri di bidang militer. Peningkatan kapasitas militer ini penting apabila China ingin mengimbangi dominasi kekuatan AS di wilayah Asia Pasifik. Keinginan untuk mengimbangi dominasi AS memang bukan hal yang mudah, namun, bukan pula suatu hal yang mustahil. Untuk itu, China rela mengeluarkan biaya yang sangat besar dari alokasi anggaran militernya untuk membeli dan mengembangkan peralatan militernya yang canggih seperti jet tempur J-10 terbaru, kapal selam nuklir, dan kapal modern yang

telah dipersenjatai rudal supersonik antikapal. Selain itu, China sendiri sedang membangun kapal induk, pesawat tempur yang tidak bisa dilacak radar dan rudal yang mampu menembak jatuh satelit. Tahun lalu, uji coba sudah dilakukan atas pesawat tempur dan kapal induk tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa pesawat tempur dan kapal induk tersebut masih membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk dapat beroperasi penuh.[98]

Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan China juga tengah memperluas kapasitas negaranya di bidang regional maritime surveillance, membangun sejumlah kapal selam baru dan mengadakan modernisasi persenjataan. Adapun modernisasi persenjataan yang dimaksud terutama pada conventional Ballistic and Land Attack Cruise Missiles yang merupakan the centerpiece of China's coercive Aerospace power seperti Short Range Ballistic Missile Infrastructure, Medium Range Ballistic Missiles, Ground Launched Cruise Missiles, Anti-ship Ballistic Missiles (ASBM) and Beyond. Pembangunan dan penyebaran ASBM merupakan salah satu contoh dari semakin meningkatnya kemampuan militer China di bidang persenjataan. Selain itu, saat ini China juga sedang mengembangkan teknologi untuk menghadapi era perang cyber.[99]Peningkatan beberapa kekuatan militer inilah yang membuat posisi Cina di dunia internasional sangat diperhitungkan. Apalagi, Cina juga mempunyai sikap yang

di sebut dengan konsep Hard Power bagi Cina. Dengan kekuatan militer yang besar inilah, Cina bisa dengan "leluasa" menggunakan kebijakan hard power terhadap negara – negara yang dianggap dapat mengancam kedaulatan dan keamanannya, salah satunya adalah Taiwan.

B. Alasan Kebijakan Hard Power Cina terhadap Taiwan

Konflik antara Cina dan Taiwan yang telah berlangsung sejak lama, telah membuat tensi ketegangan diantara kedua negara semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan karena China, yang selama ini dianggap sebagai negara "superpower" di kawasan Asia Pasifik terus – menerus melakukan upaya represif menekan Taiwan sebagai upayanya untuk memasukkan Taiwan ke dalam wilayah teritorialnya. Dan setelah penulis melakukan kajian terhadap konflik Cina – Taiwan ini, penulis dapat menganalisis bahwa yang menjadi alasan utama Cina dalam memprioritaskan kebijakan yang bersifat "Hard Power" terhadap Taiwan adalah Upaya Separatisme Taiwan yang telah menjadi ancaman bagi Cina.

Upaya separatisme Taiwan telah menjadi ancaman tersendiri bagi Cina. Hal ini disebabkan, Cina yang memandang Taiwan sebagai wilayah kekuasaannya, tentunya menginginkan Taiwan untuk masuk ke wilayah teritorialnya (sebagaimana Hong Kong dan Macau). Oleh karena itulah, untuk meredam upaya separatisme Taiwan tersebut serta 'memaksa' Taiwan untuk masuk ke dalam wilayah teritorialnya, Cina

melakukan berbagai upaya yang bersifat represif untuk mengancam bahkan menekan Taiwan agar menghentikan upayanya tersebut. Salah satu contoh yang mencolok adalah empat percobaan nuklir IRBM M-9 pada zona sasaran laut yang hanya berjarak 85 mil dari Taiwan.[100] Contoh tindakan agresif Cina lainnya adalah dengan melakukan patroli dan latihan militer di kawasan Selat Taiwan.

Bagi Cina, penggunaan kebijakan Hard Power bersifat lebih 'menguntungkan' untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Sebab, dengan melakukan kebijakan – kebijakan yang bersifat hard power, negara – negara disekitarnya termasuk Taiwan akan sangat memperhitungkan kekuatan Cina dan cenderung untuk bersikap segan terhadap Cina terutama dalam hal kedaulatan wilayah. Mengingat Cina bersikap sangat 'keras' dan tegas dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Oleh karena itulah, Cina bersikap sangat keras dalam menekan upaya pemisahan (separatisme) Taiwan ini. Implikasi atas ketegasan sikap ini ditunjukkan dengan diberlakukannya konsep 'One China Policy' (kebijakan satu Cina) untuk menentang upaya Taiwan yang menginginkan kebijakan 'One China, One Taiwan policy' (kebijakan satu Taiwan, satu Cina) yang juga diberlakukan oleh Taiwan sendiri. Dan untuk memberlakukan konsep 'One China Policy' inilah, Cina memprioritaskan Hard Power untuk meredam dan bahkan menekan upaya separatisme Taiwan yang dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Cina.

[100] Ibid Hal. 42

Beberapa tahun sebelumnya, Deng Xiaoping,[101]pernah mengumumkan mengenai lima hal yang akan menyebabkan serangan militer Cina terhadap Taiwan, kelima hal tersebut, yakni : (1) Kemampuan nuklir Taiwan, (2) Perjanjian antara Taiwan dan Rusia, (3) Pecahnya kekuatan politik secara ekstrim di Taiwan, (4) Deklarasi kemerdekaan Taiwan, dan (5) Penolakan pembicaraan kemerdekaan untuk jangka panjang.[102]

Jika dilihat dari kelima hal ini, maka jelaslah bahwa, yang menjadi alasan utama Cina memprioritaskan hard power terhadap Taiwan adalah upaya separatisme Taiwan yang telah menjadi ancaman bagi Cina. Apalagi upaya separatisme Taiwan juga dikuatkan oleh dukungan beberapa golongan yang menyetujui gerakan kemerdekaan Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase pendukung deklarasi kemerdekaan Taiwan dipertengahan tahun 1990-an sebesar 10 – 15 persen, meskipun dukungan tersebut merebak ditengah – tengah ancaman Beijing.[103]

---

[101] Presiden Cina dari tahun 1978 – 1997. Beliaulah yang melakukan reformasi ekonomi secara besar – besaran di Cina yang sekaligus mengubah wajah perekonomian Cina yang pada awalnya tertutup menjadi terbuka terhadap dunia luar/internasional. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah : "Saya tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting kucing tersebut mampu menangkap tikus"

[102] George T. Crane, "China and Taiwan: Not Yet 'Greater China'", International Affairs 69, 4 (1993), hal. 720,

[103] Harding, *"On the Four Great Relationship,"* hal 682. Sebagaimana di kutip oleh Kent E. Calder dalam bukunya yang berjudul *"Asia's Deadly Triangle : Sagitting Maut Asia"* diterbitkan oleh Pearson

Sementara itu, Taiwan juga tetap bersikeras untuk meneruskan upaya separatismenya tersebut. Untuk memperkuat upaya separatismenya, Taiwan terus menerus melakukan kampanye pemerintah yang seringkali berlangsung secara informal, untuk mendapatkan pengakuan internasional secara luas. Hasilnya, terlihat awal tahun 1990-an, dimana pada saat itu Taiwan mendapatkan keanggotaan dalam Pesta Olahraga Olimpiade, APEC, dan keanggotaan dalam Asian Development Bank (ADB/Bank Pembangunan Asia). Bahkan, pada bulan Mei 1995, Taiwan secara tiba – tiba melakukan rekayasa dengan mendesak presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, melalui tekanan kongres, untuk menyetujui kunjungan Presiden Lee Teng Hui guna berbicara dalam acara reuni alumni di Universitas Cornell di Ithaca, New York (sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 3).

Selain melakukan kampanye dan berbagai upaya lainnya untuk mendapatkan pengakuan internasional secara luas seperti yang telah dijelaskan diatas. Taiwan juga menjalin kerjasama militer dan ekonomi dengan negara – negara yang kuat secara militer dan politik seperti Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan berupa tambahan perangkat militer dan bantuan ekonomi yang besar. Alhasil, Taiwan pun dapat berkembang perlahan secara ekonomi maupun militer. Tentu saja, beberapa hal ini merupakan penghinaan terakhir dan terbesar bagi Cina. Untuk 'merusak' upaya Taiwan tersebut, Cina pun membalasnya dengan kebijakan yang penuh nafsu seperti, menangkap para aktivis hak asasi manusia maupun aktivis kemerdekaan Taiwan, mengerahkan ekspor paluru kendali secara kontroversial ke Timur Tengah, dan

melakukan 'parade' latihan militer, termasuk uji coba peluru kendali jarak jauh, di tempat yang berlokasi kurang lebih sekitar seratus mil sebelah utara Taiwan.

Akibatnya, lebih dari dua ratus penerbangan komersial menuju dan dari Taipei dipindahkan jalur penerbangannya selama satu pekan uji coba peluru kendali tersebut[104]. Imbasnya, bursa saham Taipei pun turun lebih dari 3 persen dalam sehari dan 30 persen selama semester pertama di tahun 1995, ketika di saat bersamaan Taiwan juga membalas tindakan Cina tersebut dengan manuver – manuver militernya sendiri dan mengancam Cina untuk meningkatkan kembali program nuklirnya yang telah lama tidak aktif.[105] Hal ini pun secara langsung telah menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Apalagi dengan adanya upaya Amerika Serikat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi Taiwan yang dipandang Cina sebagai penghalang bagi upayanya untuk menerapkan kebijakan 'One China Policy' (Kebijakan satu Cina). Selain itu, Cina juga memandang Amerika Serikat sebagai saingan utamanya. Tentunya, menurut penulis, kerjasama ini justru dapat menambah kekacauan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik, konflik potensial antara Cina dan Amerika Serikat pun bisa saja terjadi. Mengingat Cina sangat tidak menyukai intervensi Amerika Serikat dalam konfliknya dengan Taiwan.

---

[104] *Far Eastern Economic Review*, edisi 3 Agustus 1995, hal. 17
[105] *Japan Times*, edisi 29 Juli 1995

Berikut ini adalah tabel perbandingan kekuatan Cina dan Taiwan dalam bidang militer pada pertengahan tahun 1990-an :

Tabel I Perbandingan Kekuatan Militer Cina & Taiwan pada 1990an – 2000an

Peralatan	Cina	Taiwan
Angkatan Darat	31.300 senjata berbasis darat, 8.200 tank, 5.000 kendaraan pengangkut pasukan, 14.000 meriam, 1.700 senjata pendorong, 2.400 sistem peluncur roket, 16.000 mortir, 6.500 senjata kendali anti tank, dan 7.700 senjata anti-pesawat.	600.000 personel tentara, 200 buah Tank M-60A3 (bekas AS), serta beberapa peralatan tempur lainnya, seperti Peluncur multi-roket Thunderbolt-2000[106]
Angkatan Laut	760 unit kapal perang, 1.882 unit kapal pengangkut, 8 pelabuhan utama, 1 unit pengangkut pesawat, 21 unit kapal penghancur, 68 unit kapal selam, 42 fregat, 368 unit kapal patroli pantai, 39 unit kapal penyapu ranjau, dan 121 unit kapal amphibi.	30.000 marinir, 16 buah kapal fregat kelas Lafayette, Beberapa kapal perang kelas Kidd Makung,[107]serta 30 rudal kapal selam jenis Harpoon.[108]
Angkatan Udara	1.900 unit pesawat, 491 unit helikopter, dan 67 unit lapangan udara.	1000 pesawat tempur, Bantuan pesawat tempur F 16 dari AS, 6 helikopter AH-64Es, Helikopter jenis Black Hawk 30 Apache Longbow senilai 6,5 miliar dolar AS,[109]serta bantuan beberapa jenis pesawat tempur Mirage 2000D dari Prancis.[110]

Dan berikut ini adalah tabel perbandingan Pertumbuhan Kapasitas Nuklir kedua negara antara tahun 1992 hingga menjelang tahun 2010 :

Tabel II Perbandingan Pertumbuhan Kapasitas Nuklir

Negara	Kapasitas Tahun 1992	Kasus Referensi Rendah*	Kasus Referensi Tinggi*
Cina	0,3	+2,4	+3,9
Taiwan	4,9	+1,9	+2,9

Keterangan : *Jumlah peningkatan menjelang tahun 2010.

(Sumber : Departemen Energi AS, *International Energy Outlook,* edisi 1994, hal 37)

Namun, saat ini kekuatan militer kedua negara berkembang pesat. Hal ini dapat

Komponen	Cina	Taiwan
Angkatan Darat	9150 Tank, 4788 sarana perang tentara, 1710 meriam pendorong, 6426 artileri, 1770 Proyektor Roket (MLRS)	2005 Tank, 4550 Sarana Perang Tentara, 482 Meriam Pendorong, 1610 Artileri, 72 Proyektor Roket (MLRS)
Angkatan Laut	520 unit kapal perang, 24 unit kapal penghancur, 69 unit kapal selam, 353 kapal patroli pantai, 12,030 Armada Kapal	102 unit kapal perang, 4 kapal penghancur, 4 kapal selam, 88 kapal patroli pantai, 112 Armada Kapal
Angkatan Udara	2,788 Pesawat Tempur dan 856 Helikopter	775 Pesawat Tempur dan 276 Helikopter
Finansial	**Anggaran Pertahanan :** US$ 126,000,000 **Hutang Eksternal :** US$ 728,900,000,000 **Cadangan Devisa dan Emas :** US$ 3,341,000,000,000	**Anggaran Pertahanan :** US$ 10,725,000,000 **Hutang Eksternal :** US$ 130,800,000,000 **Cadangan Devisa dan Emas :** US$ 408,500,000,000
Bahan Bakar	**Produksi Minyak :** 4,075,000barel/hari, **Konsumsi Minyak :** 9,500,000 barel/hari **Daya Beli :** US$ 12,260,000,000	**Produksi Minyak :** 21,680 barel/hari, **Konsumsi Minyak :** 1,100,000 barel/hari, **Daya Beli :**US$ 894,300,000,000
Sumber Daya	798,500,000 Angkatan Kerja, 15 Pelabuhan dan Terminal, serta 507 Airports,	11,340,000 Angkatan Kerja, 4 Pelabuhan dan Terminal, serta 37 Service Airports

(Tabel III Perbandingan Kekuatan Militer Cina & Taiwan [illegible])

C. Analisis Teori

Dalam menganalisis sikap Cina, selain memakai konsep Hard Power penulis juga menganalisisnya dengan mengacu pada Teori Aktor Rasional. Teori ini merupakan salah satu model dari pembuatan keputusan politik luar negeri diantara dua model lainnya, yakni model proses organisasi dan model politik birokratis. Teori ini beranggapan bahwa, negara sebagai aktor utama dalam politik dihadapkan pada berbagai pilihan rasional dalam menjalin hubungan dengan negara lain ataupun dalam menyelesaikan konfliknya.[111] Lebih lengkapnya berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Richard Synder, W.H Bruck dan Burton Sapin yang mengatakan bahwa, berdasarkan teori ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, pembuat keputusan menekankan pada analisis bagaimana suatu keputusan diambil dan siapa yang mengambil kebijakan tersebut. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit

[111] Bruce Russett &Haarvey Starr, 1985, 271 sebagaimana dikutip oleh Utari Romauli Sitorus dalam

analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan demikian, analis politik luar negeri harus memusatkan perhatiannya pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Selain itu, dalam model ini digambarkan bahwa dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu, para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaannya yang mungkin dilakukan, dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Jika mengacu pada definisi teori ini, maka Cina sebagai aktor rasional tentunya akan mengambil tindakan yang dinilai dapat menguntungkan baginya. Tindakan tersebut dapat diambil berdasarkan alternatif – alternatif yang ada, yakni Soft Power dan Hard Power. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai pilihan kebijakan yang akan diambil oleh Cina. Penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kriteria Soft Power maupun Hard Power yang akan menjadi alternatif bagi Cina dalam menyelesaikan konfliknya.

Tabel IV Perbandingan Kriteria

Hard Power/Konfrontasi	Soft Power/Akomodasi
Cenderung memakai cara – cara yang koersif bahkan mengancam yang akan berujung pada konfrontasi. **Indikator :** Pelatihan Militer di kawasan negara lain.	Cenderung memakai cara – cara yang halus dan bersifat akomodatif. **Indikator :** Kerjasama Bilateral
Bersumber pada : Kekuatan bersenjata, Kapasitas Militer, dan Pengaruh yang kuat. **Indikator :** Peluncuran rudal ke selat Taiwan	Bersumber pada : Kebudayaan, Nilai – nilai politik, dan Kebijakan Luar Negerinya **Indikator :** Hubungan Diplomasi

Berdasarkan penjelasan mengenai perbandingan kedua kriteria di atas, menurut pendapat penulis, jika Cina ingin mendapatkan keuntungan dalam mengatasi gerakan separatisme Taiwan ini, maka Cina lebih baik memilih kebijakan/tindakan yang bersifat Hard Power. Hal ini di sebabkan karena dengan memakai kebijakan yang bersifat konfrontatif seperti Hard Powerlah, Cina dapat meredam gerakan separatisme Taiwan secara lebih efektif. Selain itu, dengan kapasitas militer yang besar dan kuat tentunya akan lebih berguna jika Cina menggunakan kebijakan yang bersifat Hard Power ini, meskipun hal tersebut justru akan memicu terjadinya gejolak konflik yang lebih besar. Namun, hal ini sangatlah efektif bagi Cina dalam menekan gerakan separatisme Taiwan yang menjadi ancaman bagi Cina. Oleh karena itulah, meskipun pilihan atas kebijakan Hard Power ini akan menimbulkan gejolak konflik yang lebih besar, namun jika melihat ancaman yang diberikan oleh Taiwan, maka pilihan kebijakan ini menjadi sangat rasional bagi Cina sebagai aktor. Di sisi lain

sangatlah tidak mungkin bagi Cina jika menggunakan kebijakan Soft Power yang bersifat akomodatif, karena kebijakan tersebut justru membuat Cina secara tidak langsung 'mengakui' Taiwan sebagai suatu negara yang terpisah. Jika Cina tidak mau melepaskan bahkan mengakui Taiwan sebagai negara yang terpisah, tentunya Cina harus melakukan kebijakan Hard Power.

Setiap kebijakan tentunya memiliki resikonya tersendiri, demikian pula halnya dengan kebijakan Soft Power dan Hard Power yang diambil oleh Cina. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian teori diatas, bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan perhitungan untung – rugi atas berbagai alternatif yang ada, maka Cina sebagai aktor yang rasional tentunya juga harus mempertimbangkan kalkulasi untung – rugi atas alternatif Hard Power dan Soft Power ini. Berikut ini adalah pertimbangan untung – rugi jika Cina

Tabel V Pertimbangan Untung – Rugi bagi Cina

Soft Power	Keuntungan bagi Cina	Kerugian bagi Cina
*)Kerjasama bilateral dengan Taiwan **Indikator** : Pada 4 November 2008, Cina dan Taiwan menjalin 'kerjasama bersejarah' di bidang perdagangan. *)Hubungan Diplomasi **Indikator:** Presiden Xi Jinping memberikan misi diplomatik kepada Siew untuk bertemu Ying-jeou. Keduanya mengambil waktu pembicaraan empat mata di sela-sela Forum Negara Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2013.	1)Cina dapat menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. (Secara umum, tindakan ini memang akan tetap memicu gerakan separatisme Taiwan, hal ini dikarenakan sikap Cina yang begitu lunak terhadap Taiwan saat melakukan pendekatan yang bersifat Soft Power) 2)Cina dapat mengembangkan kemajuan sektor utama seperti ekonomi dan perdagangan. (Cina akan dapat menambah pemasukan ekonomi sebesar 800 miliar, angka ini bisa diperkirakan jika melihat total PDB Taiwan yang berjumlah 876 miliar).	1)Cina tidak dapat meredam gerakan separatisme Taiwan secara efektif. (Tindakan lunak ala Soft Power ini secara tidak langsung dapat memicu semakin menguatnya tindakan separatisme Taiwan) 2)Secara tidak langsung, Cina justru mengakui Taiwan sebagai suatu negara yang terpisah dari otoritasnya. 3)Taiwan pun secara perlahan akan melepaskan diri dari otoritas Cina. (Akibatnya adalah Cina berpotensi kehilangan wilayah Taiwan yang memiliki luas 32.260 km dengan luas perairan 10,34%. Selain itu, Cina juga berpotensi kehilangan total perkapita sebesar US$ 37.720 yang disebabkan oleh lepasnya Taiwan. Jumlah itu adalah total PDB perkapita Taiwan)

Hard Power	Keuntungan bagi Cina	Kerugian bagi Cina
*) **Intervensi Militer di daerah Taiwan.** **Indikator** : Cina menggelar sebanyak 208 rudal balistik di provinsi Fujian yang berhadapan dengan Taiwan dan sebanyak 192 lainnya di provinsi Jiangxi, dan jumlah tersebut setiap tahunnya bertambah sebanyak 50 rudal. *) **Peluncuran rudal ke selat Taiwan** **Indikator:** Peluncuran peluru kendali nuklir IRBM M – 9 pada zona sasaran laut yang berjarak 85 mil dari Taiwan pada tahun 1995	1). Cina dapat menekan gerakan separatisme Taiwan secara efektif. (Jika mampu meredam gerakan separatisme Taiwan, maka Cina akan berpotensi untuk mendapatkan wilayah Taiwan yang memiliki luas 32.260 km dengan luas perairan 10,34% dari keseluruhan wilayah) 2). Cina dapat 'menggunakan' potensi kekuatan militernya yang besar secara lebih efektif.(Maksudnya, jika Cina mampu melakukan diplomasi ini, selain akan mampu meredam separatisme Taiwan. Maka Cina juga berpotensi untuk mendapatkan pemasukan sebesar US$ 37.720. Ini adalah jumlah PDB Taiwan yang berpotensi didapatkan oleh Cina apabila mampu meredam sepratisme Taiwan dan mendapatkan wilayah Taiwan) 3). Cina dapat melakukan bentuk diplomasi yang tidak mampu dilakukan oleh Taiwan.(Jika melihat tabel perbandingan kekuatan militer antara Cina dan Taiwan sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Cina dapat mempunyai peluang besar jika menggunakan Hard Power sebagai kekuatan utama)	1). Tindakan Cina ini akan memicu gejolak konflik yang lebih besar. (Diperkirakan, Cina akan mengeluarkan anggaran pertahanannya sebanyak US$ 126.000.000, namun hal ini juga akan memaksa Taiwan mengeluarkan anggaran pertahanannya sebesar US$ 10.725.000.000)

Berdasarkan pemaparan mengenai penghitungan untung – rugi ini, maka jelaslah bahwa Cina memang harus mengutamakan penyelesaian konflik yang bersifat Hard Power daripada penyelesaian konflik yang bersifat Soft Power. Hal ini dikarenakan jika melihat penghitungan keuntungan Hard Power yang begitu besar (untung tiga, rugi satu) maka Cina memang lebih cocok jika menggunakan penyelesaian konflik yang bersifat Hard Power daripada Soft Power (yang hanya mendapatkan dua keuntungan, namun disertai dengan tiga kerugian).

Selain itu, jika melihat kalkulasi penghitungan untung – rugi di atas, maka jelaslah keuntungan yang akan di dapat oleh Cina. Sebab, jika menggunakan pendekatan Hard Power, selain Cina dapat menekan gerakan separatisme Taiwan, maka Cina juga akan berpotensi mendapatkan wilayah Taiwan yang memiliki luas 32.260 km^2 dan memiliki luas 10,34 % dari total wilayah. Salah satu contohnya adalah dengan meluncurkan peluru kendali nuklir IRBM – M 9 ke wilayah Taiwan dan pada saat Cina menggelar sebanyak 208 rudal balistik di provinsi Fujian yang berhadapan dengan Taiwan.[112] Tentu saja hal ini akan sangat menguntungkan bagi Cina dalam menekan Taiwan dan Cina juga akan mendapatkan tambahan luas wilayah. Tidak hanya akan memperoleh keuntungan dari total wilayah tadi. Jika Cina tetap menggunakan pendekatan yang bersifat Hard Power maka Cina juga akan berpotensi untuk mendapatkan pemasukan PDB sebesar US$ 37.720 dan pemasukan lain sebesar US$ 867 miliar jika mampu mendapatkan wilayah Taiwan dan mencegah gerakan separatisme Taiwan, meskipun akibat dari kebijakan Hard Power ini

[112]

adalah Cina harus mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar US$ 126.000.000, namun hal itu belum sebanding dengan hasil yang didapat Cina jika mampu meredam gerakan sepratisme Taiwan dan mendapatkan wilayah Taiwan yang tentunya akan menambah luas wilayah Cina dan menambah potensi tambang serta kekayaan alam bagi Cina.

Sedangkan, apabila Cina menggunakan pendekatan yang bersifat Soft Power, Cina memang dapat menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dan akan mendapatkan pemasukan sekitar US$ 800 miliar dari kerjasama perdagangan pada 4 November 2008 dengan Taiwan,[113] namun Cina juga secara tidak langsung 'mempersilahkan' Taiwan untuk lepas dari otoritasnya, hal ini dikarenakan lunaknya sikap Cina yang akan dimanfaatkan oleh para aktivis Taiwan untuk semakin mendorong gerakan separatisme Taiwan tersebut. Hasilnya adalah Cina akan kehilangan potensi pemasukan ekonomi sebesar US$ 37.720 dan pemasukan lain sebesar US$ 867 miliar, selain itu Cina juga akan berpotensi kehilangan wilayah sebesar 32.260 km^2 dengan jumlah total 10,34% wilayah perairan. Tentunya jumlah kehilangan ini tidaklah sebanding dengan pemasukan sebesar US$ 800 miliar yang didapat Cina dari hasil kerjasama yang bersifat Soft Power dengan Taiwan. Hal ini bisa saja terjadi, sebab apabila Taiwan memisahkan diri dari Cina dan membentuk sebuah pemerintahan tersendiri. Maka Taiwan mempunyai hak untuk memutuskan hubungan dengan Cina. Pemutusan hubungan ini sendiri terkait dengan hak Taiwan sebagai negara yang berdaulat.

[113] www.vivanews.com edisi 4 November 2008 dengan judul "Cina – Taiwan Jalin Kerjasama Bersejarah" di akses pada tanggal 24 April 2014

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah bagan yang menjelaskan kalkulasi untung – rugi jika Cina memakai kebijakan yang bersifat Hard Power maupun Soft Power :

Bagan I Keuntungan dan Kerugian Cina jika menggunakan kebijakan Soft Power dan Hard Power

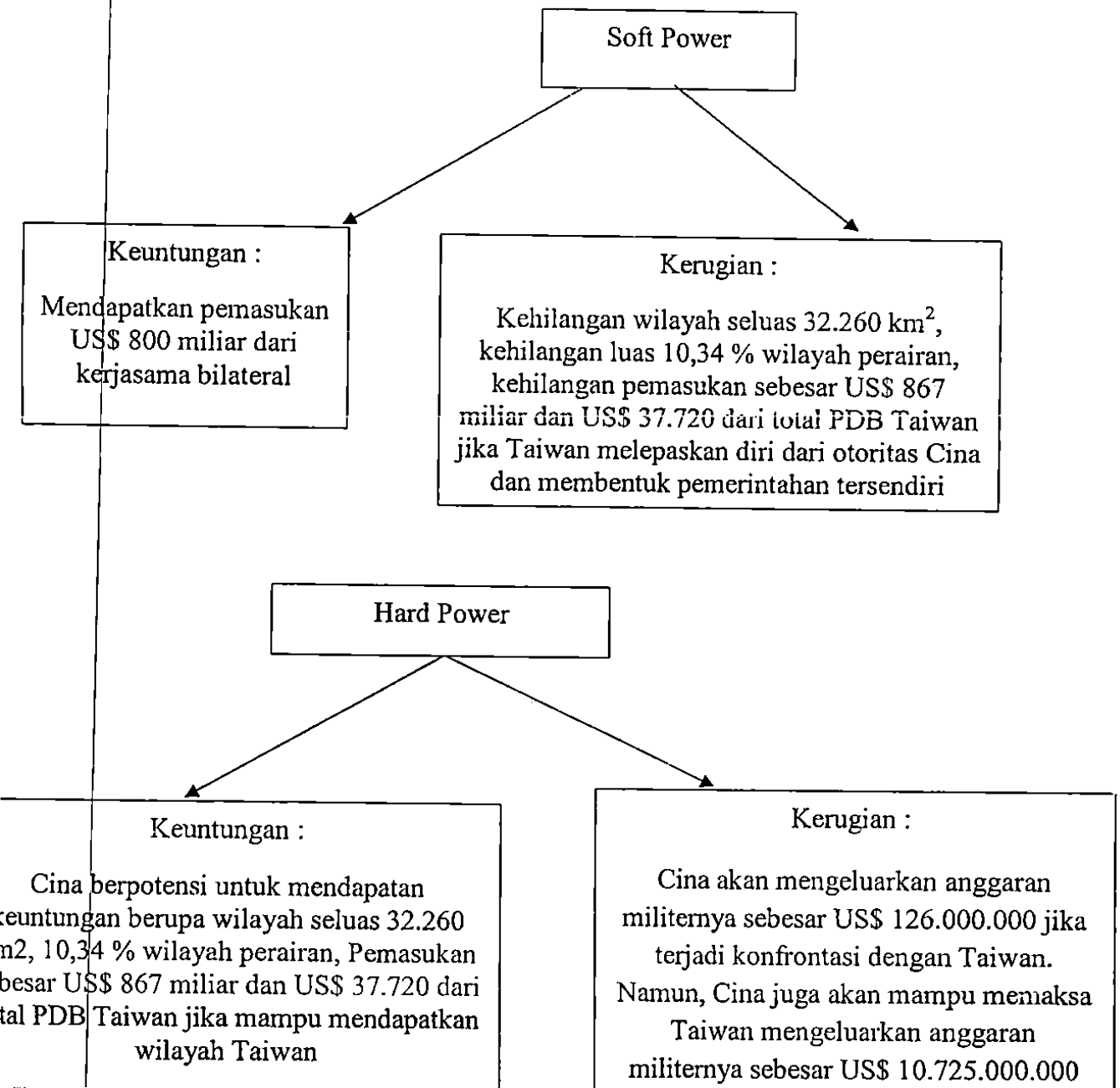

Selain itu, di beberapa halaman sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai keunggulan Cina dalam hal persenjataan militer baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ada baiknya Cina memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya ini untuk terus menekan separatisme Taiwan. Sebab, dari sisi persenjataan militer Taiwan jelas tertinggal jauh dari Cina, alhasil Cina harus menggunakan penyelesaian konflik yang bersifat konfrontasi ini untuk mengeksplorasi kelebihannya dan memanfaatkan kelemahan Taiwan. Hal ini sangat penting bagi Cina jika dibandingkan apabila Cina memilih penyelesaian konflik yang bersifat Soft Power, dimana Taiwan pun juga bisa melakukan hal tersebut, bahkan dengan pendekatan yang bersifat Soft Powerlah, Taiwan dapat menarik simpati dari negara – negara lain untuk dapat berpartisipasi dalam lingkup internasional secara luas. Oleh karena itulah, sekali lagi, Cina harus menggunakan penyelesaian konflik yang bersifat Hard Power. Selain untuk meraih keuntungan, kebijakan tersebut juga berguna untuk mengeksplorasi kelebihan Cina yang tidak dimiliki oleh Taiwan, yakni Hard Power. Kelemahan Taiwan inilah yang bisa menjadi keuntungan bagi Cina. Walaupun hal tersebut justru akan memicu hubungan kedua negara dalam konfrontasi skala besar. Namun hal inilah yang menjadi alasan rasional Cina dalam [illegible]